



Jenis Artikel: Artikel Penelitian

Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah: Peran Moderasi Teknologi Informasi

Vivian Theana*, Lilis Ardini dan Titik Mildawati

Abstrak

Latar Belakang: Kabupaten Sikka meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali, tetapi masih ada kelemahan dalam pengendalian intern dan kepatuhan regulasi. Inkonsistensi penelitian sebelumnya mendorong pengujian ulang faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan, dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai pemoderasi sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel moderating.

Metode Penelitian: Penelitian ini adalah menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarlang langsung kepada responden yaitu kepala sub bagian keuangan dan bendahara atau bagian akuntansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Sikka. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 110 responden yang dipilih secara *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode regresi berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA) pada tingkat signifikansi 5% dengan bantuan software SPSS versi 23.

Hasil Penelitian: Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Pemanfaatan teknologi informasi memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Keaslian/Kebaruan Penelitian: Penelitian ini menguji ulang variabel yang sama pada objek berbeda untuk menilai konsistensi hasil, dengan fokus pada Kabupaten Sikka yang meski meraih WTP, tetapi masih memiliki kelemahan pengendalian intern dan kepatuhan regulasi.

Kata kunci: Kompetensi Sumber Daya Manusia; Kualitas Laporan Keuangan Daerah; Pemanfaatan Teknologi Informasi; Sistem Pengendalian Intern Pemerintah



AFILIASI:

Program Studi Magister Akuntansi,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Indonesia (STIESIA) Surabaya, Jawa
Timur, Indonesia

*KORESPONDENSI:

viviantheana@gmail.com

DOI: [10.18196/rabin.v9i2.26198](https://doi.org/10.18196/rabin.v9i2.26198)

SITASI:

Theana, V., Ardini, L., &
Mildawati, T. (2025).
Pengendalian Intern dan
Kompetensi Sumber Daya
Manusia dalam
Meningkatkan Kualitas
Laporan Keuangan Daerah:
Peran Moderasi Teknologi
Informasi. *Reviu Akuntansi
dan Bisnis Indonesia*, 9(2),
319-341.

PROSES ARTIKEL

Diterima:

11 Mar 2025

Reviu:

02 Jul 2025

Revisi:

04 Jul 2025

Diterbitkan:

25 Jul 2025



Pendahuluan

Laporan keuangan berperan sebagai landasan pemahaman kondisi suatu entitas selama periode akuntansi dan berfungsi sebagai alat evaluasi

kinerja keuangan, baik bagi pihak internal maupun eksternal. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan memiliki nilai tinggi bagi sejumlah besar pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Presentasi laporan keuangan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan terkait pengelolaan dana publik. Sebagai pelaksana mandat, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada pihak yang memberikan perintah melalui pelaporan, pernyataan, dan kegiatan keterbukaan guna memenuhi tanggung jawabnya (Firdaus dkk., 2020).

Sistem pertanggungjawaban mencerminkan pelaporan keuangan terkait pelaksanaan dana pemerintah, yang dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Upaya konkret untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dilakukan melalui penyajian laporan pertanggungjawaban. Salah satu bentuknya adalah laporan keuangan yang disajikan dengan kualitas yang baik. Ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah diharuskan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah guna mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya (Novita dkk., 2018).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kualitas laporan keuangan daerah harus mematuhi standar tertentu. Standar tersebut mencakup seluruh hak dan kewajiban daerah dalam pengelolaan pemerintahan, termasuk evaluasi dalam bentuk nilai moneter dan seluruh aspek kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut. Laporan keuangan menjadi aspek krusial yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam penyajian laporan keuangannya, sekaligus menjadi representasi media pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik (Aditya & Surjono, 2017). Informasi yang disampaikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diharapkan memiliki nilai manfaat, mampu menjadi dasar pengambilan keputusan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna (Yuliani & Agustini, 2016).

Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan dan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan maksud memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Salah satu fungsi BPK adalah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 16 Ayat (1), opini diartikan sebagai pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan. BPK memberikan empat jenis opini, yakni: (1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), diberikan jika hasil pemeriksaan tidak menemukan kesalahan atau kekeliruan yang dianggap materiil; (2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP), diberikan ketika terdapat kesalahan atau kekeliruan, namun tidak memengaruhi kewajaran; (3) Tidak Wajar (TW), diberikan jika hasil pemeriksaan terbukti mengandung banyak

kesalahan dan kekeliruan yang bernilai materiil; dan (4) Tidak Memberikan Pendapat (TMP), diberikan ketika pemeriksa tidak dapat meyakini kebenaran atau kesalahan laporan keuangan karena kurangnya bukti pada saat pemeriksaan laporan keuangan (Rahayu & Kanita, 2023).

Tabel 1 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2018-2022

Opini	Tahun									
	2018		2019		2020		2021		2022	
WTP	443	82%	485	89,5%	486	89,7%	500	92,3%	496	91%
WDP	86	16%	50	9,2%	49	9%	38	7%	41	8%
TW	0	0%	0	0%	2	0,4%	0	0%	0	0%
TMP	13	2%	7	1,3%	5	0,9%	4	0,7%	5	1%

Sumber: www.bpk.go.id -IHPS 1 Tahun 2023

Tabel 1 menunjukkan bahwa opini LKPD dalam 5 tahun terakhir (2018- 2022) mengalami peningkatan dan penurunan, LKPD yang memperoleh opini WTP dari yang semula hanya 82% pada tahun 2018 menjadi 91% pada tahun 2022 artinya LKPD selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan sejumlah 9%. Sementara itu, jumlah LKPD yang memperoleh opini TMP mengalami penurunan sebanyak 2% pada LKPD Tahun 2018 menjadi 1% pada LKPD tahun 2022. Selain itu, masih terdapat 46 laporan keuangan pemerintah daerah yang belum memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian laporan keuangan pemerintah daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintah, serta kurangnya bukti yang memadai untuk mendukung kewajaran laporan keuangan tersebut. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah mengungkapkan sebanyak 12.855 permasalahan, di mana 5.628 permasalahan berasal dari Sistem Pengendalian Intern (SPI). Permasalahan dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang ditemukan oleh BPK melibatkan kelemahan dalam sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan dalam struktur pengendalian intern. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Pengendalian Intern diartikan sebagai proses yang dipengaruhi oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap aturan hukum yang berlaku dan keandalan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah.

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor kunci dalam penciptaan laporan keuangan yang bermutu. SDM yang memiliki kompetensi dan pemahaman terhadap pedoman penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas tidak hanya bergantung pada jumlah SDM, melainkan juga pada kompetensi yang dimiliki oleh mereka. Kompetensi menjadi fondasi utama dalam mencapai kinerja yang optimal. SDM yang memiliki kompetensi yang tinggi dapat menjalankan tugasnya dengan efektif, efisien, dan ekonomis. Dalam konteks ini, peran kompetensi SDM sangat signifikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian suatu entitas (Rahayu dkk., 2022).

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat inkonsistensi hasil dari berbagai penelitian sebelumnya terkait pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan pemanfaatan teknologi informasi (TI) terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan secara bersama-sama. Firdaus dkk. (2020) di Provinsi Aceh, Ridzal dkk. (2022) di Kabupaten Buton Selatan, serta Sutrisna dkk. (2022) di Kabupaten Aceh Selatan menyimpulkan bahwa SPIP, kompetensi SDM, dan TI secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian lain seperti Erawati dan Hamanay (2022) juga menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan SPIP secara bersama-sama berpengaruh signifikan di Kabupaten Sleman. Setyobudi (2022) secara spesifik menegaskan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh positif signifikan di SKPD Kabupaten Pati, sedangkan Rahayu & Kanita (2023) menemukan bahwa hanya SPIP yang berpengaruh signifikan di OPD DKI Jakarta, sementara TI tidak berpengaruh.

Namun demikian, terdapat pula penelitian yang menunjukkan hasil sebaliknya. Mardiana dan Rahim (2022) menemukan bahwa di Kabupaten Tolitoli, SPIP berpengaruh positif signifikan, tetapi TI tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Maspaitella dan Mokodompit (2022) di Kabupaten Manokwari bahkan menemukan bahwa hanya SPIP yang berpengaruh signifikan, sementara kompetensi SDM dan TI tidak memiliki pengaruh. Risnanto dkk. (2023) di Kabupaten Brebes juga menyatakan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Inkonsistensi ini mencerminkan adanya perbedaan temuan antara satu studi dengan studi lainnya, baik dari segi variabel yang berpengaruh maupun tingkat signifikansinya. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan karakteristik daerah, kondisi internal organisasi pemerintah, penerapan sistem, serta tingkat pemanfaatan teknologi yang berbeda pada masing-masing wilayah penelitian. Oleh karena itu, hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh variabel SPIP, kompetensi SDM, dan TI terhadap kualitas laporan keuangan tidak bersifat seragam, melainkan sangat kontekstual.

Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ulang menggunakan variabel yang sama, namun pada objek yang berbeda. Hal ini didasari oleh adanya kesenjangan empiris dari hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan ketidakkonsistenan. Misalnya, kompetensi SDM dinyatakan berpengaruh signifikan dalam beberapa studi (Erawati & Hamanay, 2022; Setyobudi, 2022), namun tidak berpengaruh dalam studi lain (Risnanto dkk., 2023). Demikian pula, pemanfaatan teknologi informasi terbukti berpengaruh dalam beberapa penelitian, tetapi tidak berpengaruh dalam penelitian lain (Mardiana & Rahim, 2022; Rahayu & Kanita, 2023). Inkonsistensi hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh ketiga variabel terhadap kualitas laporan keuangan daerah masih bervariasi antarwilayah, sehingga penting untuk dilakukan penelitian lanjutan yang mempertimbangkan konteks daerah yang berbeda.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel moderating. Pemilihan Kabupaten

Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai objek penelitian didasarkan pada informasi dari situs <https://flores.tribunnews.com/> (26 Juli 2023), yang menyebutkan bahwa meskipun Kabupaten Sikka telah tujuh kali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), masih ditemukan kelemahan dalam sistem pengendalian intern pemerintah dan kepatuhan terhadap peraturan, terutama dalam hal penyusunan laporan keuangan, pendapatan, belanja, dan aset. Pembaruan dalam penelitian ini terletak pada pengujian ulang dua variabel utama, yaitu sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan kompetensi sumber daya manusia (KSDM), namun dengan objek dan konteks wilayah yang belum banyak diteliti sebelumnya, yakni Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan di wilayah yang lebih maju secara administratif atau berbeda karakteristiknya, seperti DKI Jakarta, Aceh, dan Sleman. Selain itu, penelitian ini menggunakan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel moderating, yang belum banyak diterapkan secara spesifik dalam konteks daerah tertinggal atau berkembang seperti Kabupaten Sikka. Hal ini memberikan perspektif baru mengenai bagaimana teknologi berperan dalam memperkuat hubungan antara SPIP dan KSDM terhadap kualitas laporan keuangan. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian literatur mengenai pengaruh SPIP dan KSDM terhadap kualitas laporan keuangan, khususnya dengan mempertimbangkan peran teknologi informasi sebagai variabel moderasi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Sikka dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan pengembangan kompetensi SDM, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Temuan dari penelitian ini juga dapat dijadikan acuan bagi daerah lain dengan karakteristik serupa dalam merancang strategi peningkatan kualitas laporan keuangan.

Tinjauan Literatur dan Perumusan Hipotesis

Teori keagenan pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal (pemberi tugas) dan agen (pelaksana tugas). Dalam konteks pemerintahan, masyarakat bertindak sebagai prinsipal yang memberikan mandat kepada pemerintah daerah sebagai agen untuk mengelola keuangan publik secara efisien, transparan, dan akuntabel. Menurut Eisenhardt (1989), teori keagenan didasarkan pada tiga asumsi utama, yakni: 1) Asumsi tentang sifat manusia. Manusia cenderung egois dan mementingkan kepentingan pribadi, sehingga menimbulkan konflik dengan prinsipal dan berisiko menimbulkan moral hazard; 2) Asumsi keorganisasian. Dalam organisasi, agen (bawahan) lebih fokus pada kepentingan pribadi daripada tujuan organisasi, yang dapat memicu konflik internal; dan 3) Asumsi informasi. Ketidakseimbangan informasi antara agen dan prinsipal (asimetri informasi), yang memberi peluang bagi agen untuk bertindak sesuai kepentingannya sendiri.

Dalam praktik pengelolaan keuangan daerah, SPIP menjadi alat utama untuk mengurangi risiko moral hazard. SPIP memberikan struktur dan prosedur pengendalian yang

bertujuan memastikan bahwa kegiatan keuangan dilakukan secara patuh terhadap peraturan dan sesuai tujuan organisasi. Dengan pengendalian yang memadai, potensi penyimpangan dapat diminimalkan sehingga kualitas laporan keuangan meningkat.

Selanjutnya, kompetensi SDM menjadi faktor penting dalam konteks ini. Pegawai pemerintah yang memiliki kompetensi tinggi akan mampu memahami prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan, menjalankan tugas sesuai regulasi, serta menyusun laporan keuangan yang andal dan relevan. Kompetensi ini juga menjadi jembatan dalam menerjemahkan kebijakan keuangan ke dalam laporan yang informatif bagi prinsipal.

Teknologi informasi (TI) dalam penelitian ini berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara SPIP dan kompetensi SDM dengan kualitas laporan keuangan. TI membantu mengurangi asimetri informasi dengan cara menyediakan data keuangan secara cepat, akurat, dan dapat diakses oleh pihak terkait. Selain itu, TI dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Dengan demikian, teori keagenan menjelaskan bahwa kualitas laporan keuangan daerah dipengaruhi oleh kekuatan sistem pengendalian intern dan kompetensi aparatur, serta dapat dimaksimalkan melalui dukungan teknologi informasi, yang bersama-sama berfungsi untuk meminimalkan konflik kepentingan, menyelaraskan tujuan antara agen dan prinsipal, serta meningkatkan transparansi dan keandalan laporan keuangan.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Sistem pengendalian intern adalah mekanisme yang memastikan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta penyajian laporan keuangan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem ini mengawasi dan mengukur sumber daya organisasi untuk mencegah kesalahan dan penyalahgunaan. Berdasarkan teori keagenan, adanya sistem pengendalian intern yang efektif merupakan salah satu bentuk mekanisme pengawasan yang dapat mengurangi konflik kepentingan dan risiko penyimpangan oleh agen. Sistem ini terdiri dari lima unsur: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (Ridzal dkk., 2022). SPIP yang dijalankan dengan baik mampu menciptakan akuntabilitas dan transparansi yang tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini selaras dengan tujuan laporan keuangan, yaitu menyajikan informasi yang andal, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara teoritis dan empiris dapat diasumsikan bahwa semakin baik implementasi SPIP di suatu instansi pemerintah, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Erawati dan Hamanay (2022); Firdaus dkk. (2020); Mardiana dan Rahim (2022); Maspaitella dan Mokodompit (2022); Rahayu dan Kanita (2023); Ridzal dkk. (2022); Sutrisna dkk. (2022) memberikan hasil variabel sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Artinya, kualitas laporan keuangan daerah akan optimal jika pengendalian intern

berjalan efektif. Sistem ini berperan dalam mendeteksi ketidakakuratan atau kecurangan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Oleh karena itu, penerapan pengendalian intern sangat penting untuk menjaga mutu laporan keuangan pemerintah daerah.

H₁: Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia (KSDM). Sumber daya manusia yang memahami Standar Akuntansi Pemerintahan dapat menyusun laporan keuangan yang akurat, efektif, dan efisien. Keberhasilan suatu entitas tidak hanya bergantung pada jumlah sumber daya manusia, tetapi juga pada keterampilan dan pemahamannya.

Dalam perspektif teori keagenan, kompetensi sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penting dalam mengurangi konflik keagenan dan asimetri informasi antara agen (pemerintah) dan prinsipal (masyarakat). SDM yang kompeten memahami prinsip akuntansi, regulasi, serta tanggung jawab profesional, sehingga mampu menyusun laporan keuangan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kompetensi sumber daya manusia mencakup keterampilan, pengetahuan, dan tanggung jawab individu (Ariyanto, 2020). Sebaliknya, rendahnya kompetensi dapat meningkatkan risiko moral hazard dan kesalahan pelaporan. Oleh karena itu, secara teoritis dan empiris, kompetensi SDM berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Erawati dan Hamanay (2022); Firdaus dkk. (2020); Lestari dan Ardini (2023); Rahayu dkk. (2022); Ridzal dkk. (2022); Setyobudi (2022); Sutrisna dkk. (2022) menunjukkan hasil variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Artinya, sumber daya manusia yang kompeten dalam penyusunan laporan keuangan daerah dapat mempercepat proses pelaporan, memastikan ketepatan waktu, dan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia, semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

H₂: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderating

SPIP, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, berfungsi untuk memastikan efektivitas, efisiensi, keandalan laporan keuangan, perlindungan aset

negara, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Sistem pengendalian intern pemerintah menjadi mekanisme penting dalam mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya organisasi guna mencegah serta mendeteksi kesalahan dan penyalahgunaan, khususnya dalam laporan keuangan (Riandani, 2019).

Dalam kerangka teori keagenan, SPIP berfungsi sebagai mekanisme untuk meminimalkan konflik kepentingan dan risiko moral hazard antara agen (pemerintah) dan prinsipal (masyarakat). SPIP yang efektif mampu menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan. Efektivitas SPIP dalam mencegah kesalahan dan penyimpangan sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan TI. Pemanfaatan teknologi informasi berperan dalam pengolahan data, pengelolaan sistem, serta peningkatan efisiensi kerja. Teknologi informasi memungkinkan proses akuntansi dan pelaporan menjadi lebih akurat dan transparan, sekaligus mempermudah verifikasi serta pertanggungjawaban keuangan (Koto, 2019).

Integrasi sistem pengendalian intern pemerintah dengan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah melalui perlindungan data dari ancaman, mengurangi kesalahan pencatatan, dan mempercepat deteksi penyimpangan (Pratiwi dkk., 2022). Namun, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat menjadi faktor yang memperkuat atau melemahkan efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah. Jika dimanfaatkan dengan optimal, teknologi informasi dapat mempercepat proses pelaporan, meningkatkan akurasi data, mendukung transparansi laporan keuangan daerah, serta membantu mengurangi asimetri informasi antara agen dan prinsipal. Sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan secara optimal, sistem pengendalian bisa menjadi tidak efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Kansah dkk. (2023); Nokas dkk. (2022); Pratiwi dkk. (2022); Susena dan Supadmi, 2020 menunjukkan hasil variabel pemanfaatan teknologi informasi mampu memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Artinya, pemanfaatan teknologi informasi yang optimal dalam pemerintahan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengendalian intern. Penerapan pengendalian intern yang baik secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan daerah (KLKD).

H₃: Pemanfaatan teknologi informasi memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderating

Kompetensi SDM berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Sumber daya manusia yang memahami Standar Akuntansi Pemerintahan mampu menyusun laporan secara akurat, efisien, dan sesuai regulasi. Selain jumlah sumber daya manusia, kompetensi menjadi faktor utama dalam mendukung kinerja

optimal suatu entitas, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian (Rahayu dkk., 2022).

Dalam konteks teori keagenan, kompetensi SDM merupakan faktor penting dalam menjalankan fungsi keagenan secara profesional dan akuntabel. SDM yang memahami prinsip akuntansi pemerintahan serta tanggung jawabnya sebagai agen, cenderung mampu menyusun laporan keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai regulasi, sehingga mengurangi risiko moral hazard dan konflik kepentingan.

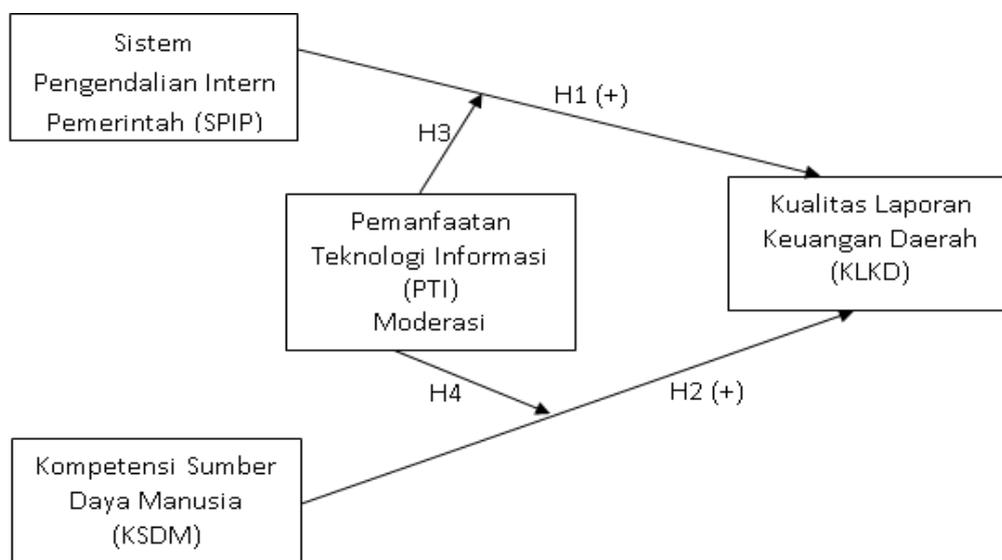
Namun demikian, efektivitas kompetensi SDM dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan juga dipengaruhi oleh pemanfaatan TI. Teknologi informasi dapat memperkuat peran SDM melalui otomatisasi proses pelaporan, peningkatan akurasi data, percepatan penyampaian informasi, serta pengurangan asimetri informasi antara agen dan prinsipal. Teknologi ini mencakup pengolahan data, sistem manajemen, serta akses layanan publik yang lebih cepat dan transparan (Koto, 2019). Pemerintah perlu mengoptimalkan teknologi informasi untuk memperkuat sistem manajemen, meningkatkan koordinasi antarunit kerja, serta memastikan bahwa SDM memiliki keterampilan dalam mengoperasikan sistem informasi di lingkungan pemerintahan daerah (Idrus dkk., 2019). Sebaliknya, tanpa dukungan teknologi yang memadai atau keterampilan penggunaan yang rendah, kompetensi SDM tidak dapat berfungsi secara optimal.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah (KLKD). Perbedaan ini diduga dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi yang dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara keduanya. Teknologi informasi membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, mempercepat pemrosesan transaksi, serta meningkatkan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan (Susena & Supadmi, 2020). Dengan demikian, kombinasi sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi informasi yang optimal dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah secara signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Idrus dkk. (2019); Nokas dkk. (2022); Pratiwi dkk. (2022); Susena dan Supadmi (2020) menunjukkan hasil variabel pemanfaatan teknologi informasi mampu memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Artinya, penggunaan teknologi informasi Penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan memengaruhi hubungan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Pemerintah telah mengadopsi teknologi seperti Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk mendukung pengelolaan keuangan. Pemanfaatan SIMDA membantu sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan yang lebih akurat, efisien, dan berkualitas.

H₄: Pemanfaatan teknologi informasi memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Dengan mengacu pada hipotesis yang dikembangkan, penelitian ini menyusun model penelitian yang ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1 Model Penelitian

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas dengan pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan antara variabel independen dan dependen menggunakan analisis statistik (Sugiyono, 2017). Populasi penelitian mencakup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Responden terdiri dari pegawai bagian keuangan atau akuntansi, termasuk kepala sub bagian keuangan dan bendahara, yang berperan langsung dalam pencatatan transaksi keuangan OPD.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu agar representatif. Populasi penelitian mencakup OPD di Kabupaten Sikka, NTT. Sampel berupa pegawai bagian akuntansi atau keuangan yang terlibat langsung dalam pencatatan transaksi dengan kriteria responden merupakan pegawai negeri bagian akuntansi atau keuangan di OPD dan memiliki pengalaman kerja minimal satu tahun dalam penyusunan laporan keuangan.

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang diperoleh melalui kuesioner kepada responden. Kuesioner dirancang untuk mengumpulkan data mengenai pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah, dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel moderating. Distribusi kuesioner dilakukan selama dua minggu, kemudian data yang terkumpul ditabulasi dan dianalisis menggunakan skala Likert (1–4) untuk mendorong

responden memberikan jawaban yang lebih spesifik tanpa opsi netral, mengingat kuesioner ini berkaitan langsung dengan pekerjaan sehari-hari responden.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Daerah; variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan variabel moderating dalam penelitian ini adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Melalui uji regresi, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh dari sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah, dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel moderating. Analisis dilakukan menggunakan software *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) edisi 23.

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Karakteristik Responden

Penelitian ini dilakukan pada OPD di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, dengan analisis data menggunakan metode kuantitatif. Sebanyak 110 kuesioner didistribusikan langsung ke berbagai OPD di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur dan berhasil dikembalikan sepenuhnya. Sebelum penyebaran, peneliti mengajukan izin ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka dengan mengirimkan proposal dan kuesioner. Proses perizinan memakan waktu 4 hari kerja, dan distribusi kuesioner berlangsung pada tanggal 03 Juni 2024 hingga 14 Juni 2024. Pada Tabel 1, hasil analisis deskriptif menunjukkan karakteristik responden dikategorikan berdasarkan jabatan, jenis kelamin, usia, lama bekerja, latar belakang pendidikan, dan jurusan pendidikan.

Tabel 1 Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Jabatan	Bendahara Keuangan	16	14,6
Jabatan	Kepala Sub Bagian Keuangan	22	20,0
Jabatan	Pejabat Penatausahaan Keuangan	31	28,2
Jabatan	Pejabat Pengguna Anggaran	27	24,5
Jabatan	Staf Bagian Akuntansi	14	12,7
Jenis Kelamin	Laki-laki	60	54,5
Jenis Kelamin	Perempuan	50	45,5
Umur	20-35 thn	42	38,2
Umur	36-50 thn	60	54,5
Umur	>50 thn	8	7,3
Lama Bekerja	1-5 thn	38	34,6
Lama Bekerja	6-10 thn	25	22,7
Lama Bekerja	>10 thn	47	42,7
Pendidikan	SLTA	9	8,2

Tabel 1 Karakteristik Responden (lanjutan)

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Pendidikan	SMA	9	8,2
Pendidikan	D3	13	11,8
Pendidikan	S1	72	65,5
Pendidikan	S2	7	6,4
Jurusan Pendidikan	Administrasi Publik	1	0,9
Jurusan Pendidikan	Akuntansi	31	28,2
Jurusan Pendidikan	Biologi	3	2,7
Jurusan Pendidikan	Ekonomi	11	10,0
Jurusan Pendidikan	Filsafat	1	0,9
Jurusan Pendidikan	Hukum	6	5,5
Jurusan Pendidikan	Ilmu Administrasi Negara	1	0,9
Jurusan Pendidikan	Informatika	2	1,8
Jurusan Pendidikan	IPA	2	1,8
Jurusan Pendidikan	IPS	6	5,5
Jurusan Pendidikan	Komunikasi	3	2,7
Jurusan Pendidikan	Manajemen	32	29,1
Jurusan Pendidikan	Pertanian	1	0,9
Jurusan Pendidikan	Sosiologi	7	6,4
Jurusan Pendidikan	Teknik	3	2,7

Berdasarkan data statistik deskriptif berdasarkan karakteristik responden pada Tabel 1, diketahui bahwa mayoritas responden menjabat sebagai pejabat penatausahaan keuangan, berjenis kelamin laki-laki, dan berusia antara 36–50 tahun. Sebagian besar dari responden memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun, dengan tingkat pendidikan terakhir didominasi oleh lulusan S1. Dari segi jurusan pendidikan, responden terbanyak berasal dari jurusan akuntansi dan manajemen. Temuan ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini memiliki latar belakang yang relevan serta pengalaman kerja yang memadai di lingkungan OPD Kabupaten Sikka.

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev.
SPIP	110	36	56	44,33	3,956
KSDM	110	23	42	32,75	4,173
PTI	110	15	24	19,11	1,705
KLKD	110	25	38	31,00	2,599
Valid N (<i>listwise</i>)	110				

Berdasarkan hasil statistik deskriptif Tabel 2, diketahui bahwa nilai minimum untuk variabel SPIP sebesar 36 dan nilai maksimum sebesar 56. Nilai *mean* (rata-rata) sebesar 44,33 dengan nilai standar deviasi 3,956. Nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai *mean* menunjukkan bahwa data memiliki variabilitas yang rendah.

Variabel KSDM menunjukkan nilai minimum sebesar 23 dan nilai maksimum sebesar 42. Nilai *mean* untuk variabel KSDM adalah sebesar 32,75 dengan nilai standar deviasi sebesar 4,173. Nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai *mean* menunjukkan bahwa data memiliki variabilitas yang rendah.

Variabel PTI menunjukkan nilai minimum sebesar 15 dan nilai maksimum sebesar 24. Nilai *mean* untuk variabel PTI adalah sebesar 19,11 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,705. Nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai *mean* menunjukkan bahwa data memiliki variabilitas yang rendah.

Variabel KLKD menunjukkan nilai minimum sebesar 25 dan nilai maksimum sebesar 38. Nilai *mean* untuk variabel KLKD adalah sebesar 31,00 dengan nilai standar deviasi sebesar 2,599. Nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai *mean* menunjukkan bahwa data memiliki variabilitas yang rendah.

Uji Validitas

Tabel 3 Hasil Uji Validitas

Item Pertanyaan	SPIP	KSDM	PTI	KLK	Keterangan
Pertanyaan 1	0,574	0,659	0,633	0,466	Valid
Pertanyaan 2	0,294	0,766	0,444	0,265	Valid
Pertanyaan 3	0,818	0,773	0,413	0,490	Valid
Pertanyaan 4	0,818	0,723	0,654	0,671	Valid
Pertanyaan 5	0,818	0,745	0,609	0,607	Valid
Pertanyaan 6	0,557	0,767	0,538	0,622	Valid
Pertanyaan 7	0,513	0,660		0,635	Valid
Pertanyaan 8	0,566	0,688		0,491	Valid
Pertanyaan 9	0,558	0,445		0,632	Valid
Pertanyaan 10	0,216	0,485		0,573	Valid
Pertanyaan 11	0,431	0,458			Valid
Pertanyaan 12	0,235				Valid
Pertanyaan 13	0,688				Valid
Pertanyaan 14	0,528				Valid

Berdasarkan Tabel 3, menunjukkan bahwa seluruh instrumen pernyataan memiliki koefisien korelasi lebih besar dari 0,1874 sehingga dapat dijelaskan bahwa seluruh indikator variabel dalam penelitian ini adalah valid dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

Uji Reliabilitas

Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Cronbach Alpha (α)	Keterangan
SPIP	14	0,813	Reliabel
KSDM	11	0,870	Reliabel
PTI	6	0,776	Reliabel
KLKD	10	0,797	Reliabel

Note: SPIP = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; KSDM = Kompetensi Sumber Daya Manusia; PTI = Pemanfaatan Teknologi Informasi; KLKD = Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada Tabel 4, setiap pertanyaan dalam kuesioner menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* (α) > 0,70. Ini menunjukkan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner memiliki tingkat reliabilitas yang baik, sehingga layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Sehingga hasil uji reliabilitas sesuai dengan metode analisis data yang dijelaskan oleh Ghozali (2016).

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, diperoleh hasil bahwa seluruh asumsi telah terpenuhi. Dengan demikian, data layak digunakan untuk analisis regresi.

Pengujian Model 1 (Analisis Regresi Linear Berganda)

Berdasarkan data pada Tabel 5, terlihat bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,000. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi layak untuk diuji karena nilai signifikansinya < 0,05. Selanjutnya, diperoleh nilai *adjusted R square* sebesar 0,209 yang menunjukkan bahwa variabel independen (SPIP dan KSDM) mampu menjelaskan 20,9% variasi terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Selain itu, nilai signifikansi < 0,05 menunjukkan bahwa SPIP dan KSDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Persamaan yang didapatkan dari hasil regresi ini adalah:

$$KLKD = 14,920 + 0,201 \text{ SPIP} + 0,219 \text{ KSDM} + e \dots \dots (1)$$

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 5, dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 14,920 secara matematis menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen, yaitu SPIP dan KSDM, sama dengan nol, maka nilai KLKD adalah 14,920. Selanjutnya, Koefisien regresi untuk variabel SPIP sebesar 0,201 berarti bahwa setiap peningkatan satu unit pada

variabel SPIP, dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan, akan meningkatkan KLKD sebesar 0,201. Kemudian Koefisien regresi untuk variabel KSDM sebesar 0,219 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit pada variabel KSDM, dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan, akan meningkatkan KLKD sebesar 0,219.

Tabel 5 Hasil Uji t

Variabel	Koefisien Regresi	t	Signifikansi	Keterangan	R	R Square	Adjusted R Square
(Constant)	14,920	4,982	0,000	-	0,473	0,224	0,209
SPIP	0,201	3,594	0,000	Berpengaruh (H1)			
KSDM	0,219	4,121	0,000	Berpengaruh (H2)			
Uji F	0,000						

Pengujian Model 2 (Moderated Regression Analysis)

Pada Tabel 6 disajikan hasil regresi untuk menjawab hipotesis moderasi, berdasarkan hasil didapatkan model persamaan yang disajikan pada Model 2. Didapatkan bahwa nilai konstanta sebesar 37,623 secara matematis menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen, yaitu SPIP*PTI dan KSDM*PTI, sama dengan nol, maka nilai kualitas laporan keuangan daerah (KLKD) adalah 37,623. Kemudian untuk koefisien regresi untuk variabel SPIP*PTI sebesar 0,035 berarti bahwa setiap peningkatan satu unit pada variabel SPIP*PTI, dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan, akan meningkatkan KLKD sebesar 0,035 Selanjutnya koefisien regresi untuk variabel KSDM*PTI sebesar 0,009 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit pada variabel KSDM*PTI, dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan, akan meningkatkan KLKD sebesar 0,009.

$$KLKD = 37,623 - 0,622 \text{ SPIP} - 0,108 \text{ KSDM} - 0,560 \text{ PTI} + 0,035 \text{ SPIP*PTI} + 0,009 \text{ KSDM*PTI} + e... (2)$$

Tabel 6 Hasil Uji Moderated Regression Analysis

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	37,623	15,052
SPIP	-0,622	0,298
KSDM	-0,108	0,264
PTI	-0,560	0,777
SPIPXPTI	0,035	0,015
KSDMXPTI	0,009	0,014

Berdasarkan Tabel 7, didapatkan koefisien determinasi atau *adjusted R square* sebesar 0,849 yang berarti bahwa 84,9% variasi dalam kualitas laporan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variabel independen dan interaksi moderasi dalam model ini, sementara sisanya sebesar 15,1% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Tabel 7 Hasil Uji t

Variabel	Koefisien Regresi	t	Signifikansi	Keterangan	R	R Square	Adjusted R Square
(Constant)	37,623	2,500	0,014	-	0,925	0,856	0,849
SPIPxPTI	0,035	2,260	0,026	Berpengaruh (H3)			
KSDMxPTI	0,009	0,688	0,493	Tidak Berpengaruh (H4)			

Selanjutnya, hasil uji regresi moderasi pada Tabel 7 menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi secara signifikan memoderasi hubungan antara sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah (H3 diterima), dengan nilai koefisien regresi 0,035, t-statistik 2,260, dan signifikansi 0,026. Namun, pemanfaatan teknologi informasi tidak memoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah (H4 ditolak), dengan nilai koefisien regresi 0,009, t-statistik 0,688, dan signifikansi 0,493.

Pembahasan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Hasil uji hipotesis pada Tabel 8 menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah diterima. SPIP memiliki peran penting dalam menjaga keandalan laporan keuangan dengan mencakup aspek lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Sistem ini bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan serta penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah (Riandani, 2019). SPIP berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang mendefinisikan pengendalian intern sebagai proses untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pemerintahan, keandalan laporan keuangan, perlindungan aset negara, serta kepatuhan terhadap regulasi.

Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan teori keagenan, yang menyatakan bahwa konflik kepentingan antara agen (pemerintah daerah) dan prinsipal (masyarakat) dapat dikurangi melalui mekanisme pengendalian. SPIP berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi konflik kepentingan dalam pengelolaan keuangan publik, sehingga mampu meningkatkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan daerah. Dengan penerapan SPIP yang efektif, risiko kesalahan dan kecurangan dapat dikendalikan, memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana daerah di Kabupaten Sikka.

Temuan ini juga konsisten dengan penelitian sebelumnya, seperti Erawati dan Hamanay (2022); Firdaus dkk. (2020); Mardiana dan Rahim (2022); Maspaitella & Mokodompit (2022); Rahayu dan Kanita (2023); Ridzal dkk. (2022); Sutrisna dkk. (2022) memberikan hasil sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Artinya, kualitas laporan keuangan daerah akan optimal jika

pengendalian internal diterapkan secara efektif. Sistem ini berfungsi sebagai alat deteksi ketidakakuratan dan kecurangan dalam proses akuntansi, serta memastikan efisiensi dan kepatuhan terhadap peraturan. SPIP tidak hanya mengurangi risiko kesalahan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi keuangan yang disajikan pemerintah. Dengan kata lain, hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa SPIP merupakan elemen kunci dalam menciptakan laporan keuangan yang andal, transparan, dan akuntabel, serta mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya di Kabupaten Sikka.

Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Hasil uji hipotesis pada Tabel 8 menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa KSDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah diterima. KSDM, yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai, menjadi faktor kunci dalam memastikan laporan keuangan daerah yang berkualitas. SDM yang kompeten lebih memahami prinsip akuntansi, kepatuhan terhadap regulasi, serta pengawasan dan evaluasi yang efektif, sehingga semakin tinggi kompetensi SDM, semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dalam teori agensi, SDM yang kompeten berperan sebagai agen terpercaya yang menjaga akurasi dan keandalan informasi keuangan. Dengan pengetahuan, keterampilan, dan integritas yang tinggi, mereka dapat meminimalkan kesalahan dan kecurangan, meningkatkan transparansi, serta membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi SDM menjadi langkah strategis dalam memperkuat akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Sikka.

Secara teoritis, hasil ini memperkuat kerangka teori keagenan, di mana kompetensi SDM yang baik membantu mengurangi risiko moral hazard dan asimetri informasi antara agen (aparatur pemerintah) dan prinsipal (masyarakat). Agen yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta integritas yang tinggi cenderung bertindak profesional dan bertanggung jawab, sehingga mampu menyusun laporan keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai regulasi. Dengan demikian, kompetensi SDM berperan penting dalam menjaga keandalan dan akuntabilitas informasi keuangan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, seperti Erawati dan Hamanay (2022); Firdaus dkk. (2020); Lestari dan Ardini (2023); Rahayu dkk. (2022); Ridzal dkk. (2022); Setyobudi (2022); Sutrisna dkk. (2022) menunjukkan hasil variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Artinya, sumber daya manusia yang kompeten dalam penyusunan laporan keuangan daerah dapat mempercepat proses penyusunan karena memiliki pemahaman yang baik terhadap tugasnya. Hal ini memastikan laporan keuangan disampaikan tepat waktu, sehingga meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Selain itu, semakin tinggi kompetensi SDM, semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Sehingga, hasil ini menegaskan bahwa peningkatan kompetensi SDM merupakan langkah strategis untuk memperkuat akuntabilitas, memperbaiki kualitas pelaporan, dan membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah, khususnya di Pemerintah Kabupaten Sikka.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderating

Hasil uji hipotesis pada Tabel 11 menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3), yaitu pemanfaatan teknologi informasi (TI) memoderasi pengaruh SPIP terhadap kualitas laporan keuangan daerah diterima. Nilai interaksi yang signifikan menunjukkan bahwa keberadaan TI memperkuat hubungan antara SPIP dan kualitas laporan keuangan. Artinya, semakin tinggi pemanfaatan TI, maka efektivitas SPIP dalam mendorong laporan keuangan yang andal, akurat, dan transparan juga semakin meningkat.

Secara teoretis, hasil ini konsisten dengan teori keagenan, di mana penggunaan teknologi informasi membantu mengurangi asimetri informasi antara agen (pemerintah) dan prinsipal (masyarakat). Teknologi mendukung otomatisasi sistem pengendalian, mempercepat pemrosesan data keuangan, serta memudahkan akses informasi keuangan oleh berbagai pihak. Hal ini memungkinkan audit internal dan pengawasan yang lebih efektif, serta meminimalisir peluang terjadinya moral hazard dan manipulasi data oleh agen.

Secara empiris, temuan ini selaras dengan hasil penelitian dari Kansah dkk. (2023); Nokas dkk. (2022); Pratiwi dkk. (2022); Susena dan Supadmi (2020) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengendalian intern mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan sektor publik. Teknologi terbukti mempercepat deteksi kesalahan, meningkatkan efisiensi pencatatan, dan menjaga keakuratan data keuangan. Sehingga, hasil penelitian ini memperkuat pentingnya investasi dalam infrastruktur dan kapasitas teknologi informasi bagi pemerintah daerah, tidak hanya sebagai alat bantu administratif, tetapi juga sebagai elemen strategis dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui penguatan sistem pengendalian intern.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderating

Hasil pengujian pada Tabel 11 menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H4) ditolak, yaitu pemanfaatan teknologi informasi tidak memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia (KSDM) terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Artinya, tidak ditemukan bukti yang cukup kuat bahwa teknologi informasi memperkuat hubungan antara kompetensi SDM dan kualitas laporan keuangan.

Secara empiris, temuan ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM tetap menjadi faktor kunci yang berdiri sendiri dalam memengaruhi kualitas laporan keuangan. Pengetahuan, keterampilan, dan keahlian pegawai lebih menentukan dibandingkan seberapa jauh teknologi dimanfaatkan. Di Kabupaten Sikka, keterbatasan infrastruktur, kurangnya pelatihan, serta rendahnya adaptasi terhadap penggunaan sistem informasi seperti SIMDA, menjadi hambatan dalam mengoptimalkan peran teknologi informasi sebagai moderator.

Dalam konteks teori keagenan, hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun teknologi berpotensi mengurangi asimetri informasi, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan agen (SDM) dalam memanfaatkannya. Jika kompetensi SDM belum selaras dengan penguasaan teknologi, maka peran TI tidak mampu menjembatani kesenjangan informasi antara agen dan prinsipal.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kansah dkk. (2023) yang juga menunjukkan bahwa teknologi informasi belum mampu memoderasi hubungan antara kompetensi SDM dan kualitas laporan keuangan. Dalam studi tersebut, ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menerapkan dan mengelola sistem informasi keuangan secara optimal menjadi penyebab utama lemahnya peran TI. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kompetensi SDM tetap menjadi prioritas utama dalam peningkatan kualitas laporan keuangan daerah. Teknologi informasi hanya akan berdampak signifikan apabila ditopang oleh infrastruktur yang memadai dan kapasitas pengguna yang memadai pula. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan dan perbaikan sistem pendukung menjadi krusial agar teknologi tidak sekadar menjadi alat administratif, tetapi mampu mendorong peningkatan kinerja pelaporan secara nyata.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa SPIP dan KSDM berpengaruh positif terhadap KLKD di Pemerintah Kabupaten Sikka. Penerapan SPIP yang efektif serta SDM yang kompeten terbukti mampu meningkatkan akurasi, relevansi, dan transparansi laporan keuangan, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, PTI terbukti memoderasi pengaruh SPIP terhadap KLKD, artinya penggunaan teknologi dapat memperkuat efektivitas pengendalian intern dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Namun, PTI tidak memoderasi pengaruh KSDM terhadap KLKD, yang disinyalir disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, pelatihan, dan pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal. Dengan demikian, penguatan kompetensi SDM tetap menjadi prioritas utama, sementara teknologi informasi berperan sebagai alat pendukung yang perlu terus dioptimalkan untuk mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan daerah secara menyeluruh.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Kuesioner yang digunakan diadaptasi dari penelitian sebelumnya, sehingga ada kemungkinan kesalahan pengukuran karena pernyataannya tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi objek penelitian saat ini. Selain itu, pengumpulan data melalui survei kuesioner berisiko menghasilkan jawaban yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya. Keterbatasan ini dapat memengaruhi akurasi dan validitas temuan penelitian.

Penelitian ini memberikan implikasi kebijakan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan daerah dapat dicapai melalui penguatan SPIP dan pengembangan kompetensi SDM aparatur. Pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat pelatihan berkelanjutan serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat pendukung pelaporan yang akurat, transparan, dan akuntabel. Selain itu, peningkatan

infrastruktur dan budaya kerja yang adaptif terhadap teknologi perlu menjadi perhatian, agar sistem informasi dapat berfungsi secara optimal.

Dari sisi kontribusi sosial penelitian ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui tata kelola keuangan daerah yang lebih profesional dan bertanggung jawab. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengeksplorasi topik serupa dengan pendekatan yang lebih mendalam. Disarankan penggunaan metode yang lebih beragam, seperti wawancara atau kuesioner yang lebih luas, serta mempertimbangkan variabel tambahan seperti sistem akuntansi keuangan daerah, reviu laporan keuangan, dan aspek etika profesi untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Aditya, O. R., & Surjono, W. (2017). Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Sistem Informasi, Keuangan, Auditing dan Perpajakan (SIKAP)*, 2(1), 49–62.
- Aquinaldo, A. (2023, Juli 26). Raih WTP, BPK catat adanya temuan, Bupati Sikka: Mari kita selesaikan 60 hari ke depan. *TribunFlores.com*. <https://flores.tribunnews.com/2023/07/26/raih-wtp-bpk-catat-adanya-temuan-bupati-sikka-mari-kita-selesaikan-60-hari-kedepan>
- Ardini, L. (2023). Pengaruh kompetensi, independensi, akuntabilitas dan motivasi terhadap kualitas audit. *Jurnal Majalah Ekonomi*, 3, 329–349.
- Ariyanto, S. (2020). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan tahun 2018. *Valuta*, 6(1), 41–45.
- BPK RI. (2023). *Laporan keuangan semester I tahun 2023*. BPK RI.
- Dachi, A. I., Erlina, & Bukit, R. B. (2019). Analysis of factors affecting the quality of financial statements using information technology as moderated variables in the government of the South Nias Regency. *International Journal of Public Budgeting, Accounting and Finance (IJPBAF)*, 2(3).
- Erawati, T., & Hamanay, A. S. (2022). Pengaruh implementasi aplikasi sistem keuangan desa, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa (Studi kasus pada desa di kecamatan Pakem kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 15–22.
- Firdaus, W., Ibrahim, R., Harmani, H., & Djalil, M. A. (2020). The effect of organizational commitments, human resource competency, utilization of information technology, effectiveness of internal control, and the implementation of government accounting standard on the quality of financial statement of government age. *Cross Current International Journal of Economics, Management and Media Studies*, 2(3), 80–88. <https://doi.org/10.36344/ccijemms.2020.v02i04.002>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (Edisi ke-9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hainil, S., & Silvera, D. L. (2021). Pengaruh kualitas sumber daya manusia bidang akuntansi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada Polres Padang. *Jurnal Pareso*, 3(3), 599–616.

- Harjaningrum, E. A., & Ardini, L. (2021). Analisis penerapan akuntabilitas keuangan, pengendalian internal dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(1), 1–25.
- Humam, A., Ardini, L., & Kurnia. (2020). Efektivitas sistem pengendalian intern dalam mencegah kecurangan di perusahaan daerah. *EQUITY*, 23(2), 151–166.
- Hutapea, P., & Thoaha, N. (2008). *Kompetensi plus: Teori, desain, kasus dan penerapan untuk HR dan organisasi yang dinamis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Idrus, E., Riharjo, I. B., & Hermanto, S. B. (2019). Pengaruh kompetensi, sistem pengendalian, rekonsiliasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah: Teknologi informasi sebagai variabel moderasi (Studi empiris pada organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Alor NTT). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(9), 1–24. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4270/4283>
- Jensen, M., & Meckling, W. (2012). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. In *The economic nature of the firm: A reader* (3rd ed.). <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Kansah, D. D., Utaminingtyas, T. H., & Fauzi, A. (2023). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel moderasi. *Jurnal Revenue – Jurnal Akuntansi*, 4(1), 405–419. <https://doi.org/0.46306/rev.v4i1.278>
- Karyadi, M. (2019). Pengaruh sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas keuangan desa (Studi di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek tahun 2018). *Jurnal Ilmiah Rinjani*, 7(2), 33–46.
- Koto, A. N. S. (2019). *Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian sebagai variabel intervening* (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jakarta).
- Lestari, I. N., & Ardini, L. (2023). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12(9), 1–19.
- Lestari, N. L. W. T., & Dewi, N. N. (2020). Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 170–178.
- Lubis, P. (2018). *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Pd. Pasar Kota Medan* (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan).
- Mardiana, M., & Rahim, I. (2022). The effects of government internal control systems and technology utilization on the financial statement quality of local government. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 9(1), 57–66. <https://doi.org/10.33096/jmb.v9i1.1083>
- Maspaitella, M. R., & Mokodompit, M. P. (2022). The quality of local government financial report. *Global Financial Accounting Journal*, 6(1), 31–38. <https://doi.org/10.37253/gfa.v6i1.6493>
- Nokas, E. D., Sitinjak, N., & Apriyanto, G. (2022). Peran kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan melalui pemanfaatan teknologi informasi pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang. *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, 2(10), 857–864. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i10.428>
- Novita, I., Gamayuni, R. R., & Farichah, F. (2018). Analysis of asset value recognition and quality of financial statements before and after the application of the accrual-based accounting system. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 23(1), 1–13.

- Pemerintah Kabupaten Sikka. (2020, Mei 19). *Peraturan Bupati Sikka Nomor 19 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban belanja tidak terduga dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019. Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 19.*
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004, Juli 19). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66.* <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40509/uu-no-15-tahun-2004>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004, Oktober 15). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.* <https://peraturan.bpk.go.id/Details/65684/pp-no-32-tahun-2004>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005, Desember 9). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138.* <https://peraturan.bpk.go.id/Details/49722/pp-no-56-tahun-2005>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005, Desember 9). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140.* <https://peraturan.bpk.go.id/Details/49730/pp-no-58-tahun-2005>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2006, April 3). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25.* <https://peraturan.bpk.go.id/Details/49029/pp-no-8-tahun-2006>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008, Agustus 28). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127.* <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4876>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010, Oktober 22). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123.* <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Pratiwi, M. E., Din, M., Masdar, R., Amir, A. M., Zahra, F., Kahar, A., & Meldawati, L. (2022). Utilization of information technology to increase human resources capacity and internal control systems on local government financial reporting information. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 10(1), 191–199. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2022.100120>
- Rahayu, A. S., Ningsih, S., & Pratiwi, D. N. (2022). The influence of human resource competence, implementation of government accounting standards and regional financial accounting systems on the quality of regional financial reports (Empirical study of SKPD Sukoharjo Regency). *Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(3), 1181–1191. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR/article/view/6233>
- Rahayu, S., & Kanita, A. D. (2023). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Studi kasus pada organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2022). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 423–432. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.3093>
- Riandani, R. (2019). *Pengaruh kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan (Studi empiris pada SKPD Kab. Limapuluh Kota)* (Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang).
- Ridzal, N. A., Sujana, I. W., & Malik, E. (2022). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap

- kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan. *Owner*, 6(3), 3094–3104. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.882>
- Risnanto, H., Widiyanti, H., & Amaliyah, F. (2023). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan. *Monex - Journal of Accounting Research*, 12(1), 140–150.
- Setyobudi, S. (2022). Pengaruh pemahaman sistem akuntansi, pengelolaan keuangan, kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 3(3), 502–509. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i3.128>
- Shohabatussa'adah, & Nasrullah, M. (2021). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pekalongan. *Journal of Public Accounting (JPA)*, 1(1), 14–24. <https://doi.org/10.30591/jpa.v1i1.2614>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Cetakan ke-26). Bandung: Alfabet.
- Susena, I. N. A., & Supadmi, N. L. (2020). Teknologi informasi memoderasi pengaruh pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(3), 584–597. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i03.p03>
- Sutrisna, M., Nadirsyah, N., & Indayani, I. (2022). The effect of human resource competence, utilization of information technology, internal control systems, and application of government accounting standards on the quality of financial reporting (Study on South Aceh Government SKPK). *International Journal of Business, Economics, and Social Development*, 3(3), 124–134. <https://doi.org/10.46336/ijbesd.v3i3.311>
- Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2016). Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 14(1), 56–64.
- Zubaidi, N., Cahyono, D., & Maharani, A. (2019). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. *International Journal of Social Science and Business*, 3(2), 68–76. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJSSB/article/view/17579>